



JUMAT, 12 JUNI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Pembangunan Pangkalan Bakamla Bengkulu Direncanakan di Enggano

BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan hibahkan 12 hektare lahan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk dibangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengamanan laut.

Diketahui, 12 hektare lahan tersebut tepatnya berada pada di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dipilihnya lahan di Pulau Enggano tersebut, dikarenakan letak pulau itu sendiri sehingga dapat menunjang Sistem Keamanan dan Pemantauan Maritim "National Maritime Security System" (NMSS).

Diungkapkan, Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar bahwa pengalokasian lahan ini guna menindaklanjuti permohonan dari pihak Bakamla RI yang meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menghibahkan lahan guna mendirikan stasiun Bakamla RI di Provinsi Bengkulu.

Untuk memenuhi permintaan Bakamla RI tersebut, Pemprov Bengkulu menggelar rapat penetapan pengalokasian ruang dan lahan untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) di ruang Rapat Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis, 11 Juli 2024.

Rapat tersebut, diikuti oleh Kepala BPKAD, Dishub, DKP, Biro Hukum, Biro Bangda, serta Biro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu.

"Lahan yang akan kita serahkan atau kita hibahkan ini nanti tentu lahan yang sudah bersertifikat dan sudah 'clear and clean' serta sudah tercatat pada aset kita," sebut Khairil.

Khairil menerangkan, bahwa berdasarkan hasil rapat yang dilakukan, ada beberapa opsi lahan yang akan diserahkan kepada Bakamla RI, baik lahan milik aset Pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun hibah lahan dari masyarakat Enggano.

Terlepas, sumber lahan tersebut nantinya seperti apa. Pemrov Bengkulu akan mengupayakan Stasiun Bakamla RI tersebut berada berdekatan dengan pelabuhan di pulau terluar Bengkulu tersebut.

"Sedapat mungkin, lahan tersebut berdekatan dengan pelabuhan laut di Pulau Enggano, yaitu di Desa Malakoni dan Kahyapu agar akses Bakamla dapat cepat dan lancar," terang Khairil.

Lebih jauh, Khairil mengatakan, bahwa salah satu opsi lokasi lahan yang akan dihibahkan yaitu lahan di SMAN 6 Enggano seluas lebih kurang 12 hektare yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, opsi lainnya yaitu lahan masyarakat yang bisa dihibahkan untuk Bakamla RI.

"Nanti kita undang aparat desa setempat termasuk juga tokoh masyarakat maupun pemuka adat di Enggano untuk menawarkan lahan mereka ataupun aset desa yang bisa dihibahkan bagi kepentingan Bakamla," terang Khairil.

Hal itu dilakukan, ujarnya, mengingat keamanan laut ini bukan hanya untuk kepentingan Pulau Enggano maupun Provinsi Bengkulu saja, namun lebih dari itu untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Itu opsi lainnya, namun yang jelas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu akan kita coba tawarkan lahan yang di SMAN 6 Enggano," kata Khairil.

Sekadar mengulas, Bakamla RI berencana membangun Pangkalan Keamanan di Provinsi Bengkulu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes., menyambut baik setiap rencana pemerintah pusat untuk membangun kantor di Provinsi Bengkulu. Termasuk rencana Bankala ini.

"Pada prinsipnya kita, akan selalu mendukung institusi pusat yang akan membuat kantor di Provinsi Bengkulu," ungkap Isnan, Rabu, 21 April 2024 lalu.

Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan Bakamla RI kepada Pemprov Bengkulu.

Sehingga akan dijadwalkan audiensi ke Gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti pembangunan pangkalan tersebut.

"Kita memang sudah ada sebatas obrolan, dan ini akan kita tindaklanjuti dengan diagendakan audiensi dengan pak Gubernur," katanya.

Selanjutnya Isnan, menyatakan untuk tempat pembuatan pangkalan keamanan laut tersebut, kemungkinan besar akan dibangun di lahan PT. Pelindo yang berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melakukan negosiasi dengan PT. Pelindo.

"Mungkin akan pangkalanya di kawasan PT Pelindo, karena di sana masih banyak lahan tidur, lebih baik kita manfaatkan untuk pembangunan pangkalan ini," demikian Isnan.

Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, SH, CHRMP., M.Tr. Opls, menyampaikan, pihaknya telah memberikan surat kepada pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu.

Di dalam surat itu, pihaknya meminta hibah lahan tempat pembangunan Pangkalan Keamanan Laut Bakamla RI di Provinsi Bengkulu.

"Saya sudah bersurat ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kota Bengkulu, untuk dapat diberikan lahan untuk membikin pangkalan Kavaleri," ujar Irvansyah.

Untuk anggaran pembangunan pangkalan saat ini sudah tersedia. Sehingga, jika dalam waktu dekat Pemprov memberikan hibah lahan itu, maka pada tahun 2024 ini akan segera dilakukan pengejaran pembangunan.

"Kalau anggarannya kita cari, maka kalau kita sudah dapat lahan tahun ini sudah bisa kita kerjakan pembangunannya," ujarnya.

Selanjutnya, Irvansyah mengatakan untuk pangkalan Bakamla di Indonesia baru ada sekitar 15 stasiun.

Sehingga ditargetkan dalam waktu dekat akan terbangun sebanyak 35 stasiun tersebar di Indonesia salah satunya di Provinsi Bengkulu.

"Untuk saat ini baru ada 15 stasiun kavaleri. Ke depan akan dibangun 35 stasiun untuk memantau se Indonesia, semoga salah satunya di Bengkulu," imbuhnya.

Menurutnya kesempatan yang bagus jika putra putri Bengkulu bergabung di Bakamla RI. Sekian peluang bergabung masih cukup besar, juga banyak bidang disiplin ilmu.

"Karena peluangnya semakin besar banyak bidang disiplin ilmu yang bisa didapat seperti bidang hukum tentang kelautan dan kesehatan dan lainnya," katanya.

Ia berharap dengan adanya pangkalan tersebut selain akan menjadi pengamanan, juga bisa memberikan daya tarik terhadap Putra-putri Bengkulu bergabung ke Bakamla RI.

"Dengan adanya pangkalan di Bengkulu mudah-mudahan juga ada putra putri dari Bengkulu bisa bergabung di Bakamla RI," ujarnya.(afa)